

Upaya Penanggulangan Disparitas Wilayah Kabupaten Cianjur Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Disparity Construction Efforts in The Cianjur District, from The Economic Aspect

¹Fakhri Muhammad Adisaputra, ²Nia Kurniasari

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹fakhrimuhammadadisaputra@gmail.com, ²niawitaesna@gmail.com

Abstract. Disparity between regions is currently still a challenge in development in Indonesia. Likewise with inequality that occurred in Cianjur Regency. Even though it has economic potential in the agriculture and tourism sectors, in spatial policies it is explained that regional disparities can be reduced through spatial planning, development policies and regional imbalance reduction programs. From this spatial policy, explaining regional inequality is characterized by the complete infrastructure development of economic activities so that the northern region of Cianjur district is more advanced. In addition, it can be seen from the Village Build Index (IDM) and Village Development Index (IPD) data that there are 8 sub-districts categorized as lagging and 2 sub-districts categorized as very underdeveloped. This research begins with existing phenomena, review of the Cianjur Regency RTRW, Village Build Index, Village Development Index to see the identified regions of the dispartas. This research method uses a model of reducing regional inequality (enchancing market forces: the factor of mobility and product market integration). In order to reduce the level of disparity in the Cianjur Regency area, this study resulted in efforts to overcome the disparity in the area of Cianjur Regency in terms of economic aspects.

Keywords: Regional disparity, economy, countermeasures

Abstrak Disparitas antar wilayah pada saat ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia. Demikian juga dengan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Walaupun memiliki potensi ekonomi dalam sektor pertanian dan pariwisata, dalam kebijakan spasial menjelaskan bahwa disparitas wilayah tersebut dapat dikurangi melalui penataan ruang, kebijakan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah. Dari kebijakan spasial tersebut, menjelaskan ketimpangan wilayah dicirikan dengan kelengkapan infrastruktur pengembangan kegiatan perekonomian sehingga wilayah Utara kabupaten Cianjur lebih maju. Selain itu, dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) terdapat 8 kecamatan dikategorikan tertinggal dan 2 kecamatan dikategorikan sangat tertinggal. Penelitian ini diawali dengan fenomena eksisting, kajian RTRW Kab.Cianjur, Indeks Desa Membangun, Indeks Pembangunan Desa guna melihat wilayah yang teridentifikasi dispartas. Metode penelitian ini menggunakan model pengurangan ketimpangan wilayah (enchancing market forces: factor mobility and product market integration). Guna mengurangi tingkat disparitas wilayah Kabupaten Cianjur, penelitian ini menghasilkan upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi.

Kata Kunci: Disparitas wilayah, ekonomi, upaya penanggulangan

A. Pendahuluan

Ketika pembangunan di prioritaskan pada suatu lokasi maka terdapat wilayah maju (Developed Region). Dan sebaliknya, wilayah yang tidak terdampak kepada prioritas pembangunan maka terjadi wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). Perbedaan wilayah tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis

warga masyarakat (agusta, 2014).

ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Dalam kebijakan spasial Kabupaten Cianjur di jelaskan bahwa ketimpangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Cianjur dapat dikurangi melalui penataan ruang, kebijakan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah. Hal itu dapat dilakukan dengan kebijakan penataan pembangunan dan program pengurangan ketimpangan wilayah di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan data yang ada, bahwa Kabupaten Cianjur mempunyai potensi untuk

pengembangan wilayah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata.

Namun pada sisi lain, dalam kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Cianjur belum sesuai dengan yang diminta dalam kebutuhan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, menurut data Indeks Desa Membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat 2 kecamatan yang dikategorikan kawasan sangat tertinggal yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Cikadu. Dan 8 kecamatan yang dikategorikan kawasan tertinggal yaitu Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Leles, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Takokak, dan Kecamatan Campakamulya. Kecamatan tersebut berdasarkan lokasi geografi didominasi kawasan tertinggal dan sangat tertinggal di wilayah selatan Kabupaten Cianjur.

Selain itu terdapat 11 kecamatan yang dikategorikan kawasan berkembang yaitu Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Cicalongkulon, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cijati, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Cidaun, dan Kecamatan Bojongpicung. Terdapat 11 kecamatan yang dikategorikan kawasan maju yaitu Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Campaka, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Mande. Kecamatan tersebut berdasarkan lokasi geografi didominasi kawasan berkembang dan maju di wilayah utara Kabupaten Cianjur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya disparitas wilayah antara wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Cianjur. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu adanya upaya-upaya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah Kabupaten Cianjur. Upaya-upaya tersebut berupa perencanaan dan strategi keberpihakan dalam rangka meminimalisir kesenjangan wilayah Kabupaten Cianjur. Dengan terjadinya permasalahan tersebut dalam sebuah wilayah sebagai akibat dari dampak pembangunan yang tidak merata. Maka itu perlunya “Upaya Penanggulangan Disparitas Wilayah Kabupaten Cianjur Ditinjau Dari Aspek Ekonomi”.

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pertumbuhan wilayah, model pengurangan ketimpangan wilayah, dan teori daya saing wilayah. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

Teori Pertumbuhan Wilayah

Teori pertumbuhan wilayah terbagi menjadi empat yaitu teori *resource endowment*, teori ekspor base, teori pertumbuhan regional neo-klasik, dan pertumbuhan baru.

- a. Teori Resource Endowment
Teori Resources Endowment dari suatu wilayah menyatakan bahwa perkembangan ekonomi wilayah dalam pembangunan bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu. Dengan kata lain wilayah memiliki *comparatif advantages* terhadap wilayah lain (spesialisasi).
- b. Teori Ekspor Base

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan jangka panjang wilayah bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan di ekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik kebelakang “backward linkages” (sektor produksi) maupun kedepan “forward linkages” (sektor pelayanan).

c. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini mengaranakan bahwa pertumbuhan wilayah tergantung tiga faktor yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal (investasi), dan kemajuan teknologi (eksogen, terlepas dari faktor investasi dan tenaga kerja). Semakin besar kemampuan wilayah dalam penyediaan 3 faktor tersebut, semakin cepat pertumbuhan wilayah.

d. Pertumbuhan Baru

Teori ini percaya pada kekuatan teknologi (sebagai faktor endogen) dan inovasi sebagai faktor dominan pertumbuhan wilayah (untuk meningkatkan produktivitasnya). Kuncinya adalah investasi dalam pengembangan

sumberdaya manusia dan research and development. Teknologi tinggi dan inovasi yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan riset dan pengembangan adalah syarat meningkatkan pertumbuhan wilayah.

Model Pengurangan Ketimpangan Wilayah

Salah satu fungsi penting dari pembangunan kawasan ekonomi adalah sebagai strategi mengurangi ketimpangan wilayah (Muta’ali, 2015). Dasgupta, Thapar, dan Kittiprapas (World Bank, 1997 dalam Muta’ali, 2015) mengklasifikasikan pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan wilayah menjadi 5 (lima) model, sebagai berikut:

- a. The Fiscal-Transfer-Equalizing Role of the State Model ini mendasarkan pada premis bahwa mekanisme pasar tidak bisa mengurangi ketimpangan antarwilayah. Wilayah yang dikaruniai limpahan sumber daya (keuntungan lokasi, SDA, SDM, infrastruktur publik, ekonomi aglomerasi, dan modal swasta) akan tumbuh pesat, sedangkan wilayah yang tidak memiliki limpahan ini akan tumbuh lambat. Untuk itu perlu campur tangan pemerintah dalam bentuk transfer uang ke wilayah terbelakang.
- b. Enhancing Market Forces: Factor Mobility and Product Market Integration Model dari paradigma ini adalah bahwa kekuatan

pasar akan mengurangi kesenjangan wilayah. Wilayah yang lebih miskin bisa mengejar ketertinggalannya melalui penemuan/eksploitasi SDA baru, pengembangan SDM, mobilisasi tenaga kerja dan migrasi, pengurangan biaya transport dan kendala lokasi, serta perbaikan infrastruktur publik.

c. The State-Led (Infrastruktur) Investment Model

Investasi yang diarahkan oleh Negara dapat mengembangkan wilayah miskin (misalnya jalan, air baku, tenaga listrik, dan telekomunikasi).

d. The Growth Pole or Strategic Investment Model

Ide model ini adalah investasi strategis di sektor atau industri andalan dapat membawa wilayah terbelakang ke arah pertumbuhan baru sesuai yang diinginkan.

e. The Institutional Model: Centralization vs Decentralization

Belajar dari banyaknya kegagalan yang dialami oleh struktur yang tersentralisasi dalam mengembangkan dan menyeimbangkan wilayah secara berkelanjutan, maka diperlukan perubahan struktur administrasi dan institusi, dari struktur yang tersentralisasi ke struktur yang terdesentralisasi. Alasannya yaitu struktur yang tersentralisasi mengabaikan karakter lokasi atau keanekaragaman

kondisi dan preferensi lokal, sedangkan desentralisasi akan memperkuat penyampaian jasa pelayanan publik lokal secara lebih efisien.

Teori Daya Saing Wilayah

Dalam teori daya saing wilayah menurut Lutfi Muta'ali, 2015 terbagi menjadi dua yaitu teori keunggulan komparatif dan teori daya saing wilayah (*compotitif*).

a. Teori Keunggulan Komparatif (*Compotitive Advantage Theory*)

b. Teori keunggulan komparatif umumnya mendukung dilakukannya spesialisasi produksi di suatu negara berdasarkan pemanfaatan yang intensif atas dasar faktor produksi yang relatif dominan dimilikinya termasuk penumpukan modal fisik dan penelitian.

c. Teori keunggulan Kompetitif Wilayah (*Regional Compotitiveness*)

d. Keunggulan kompotitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara atau bangsa untuk dapat besaing di pasar internasional.

C. Hasil Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, menggunakan model pengurangan ketimpangan wilayah *Enhancing Market Forces: Factor Mobility and Product Market Integration*. Sehingga adanya upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi. Adapun upaya penanggulangan sebagai berikut:

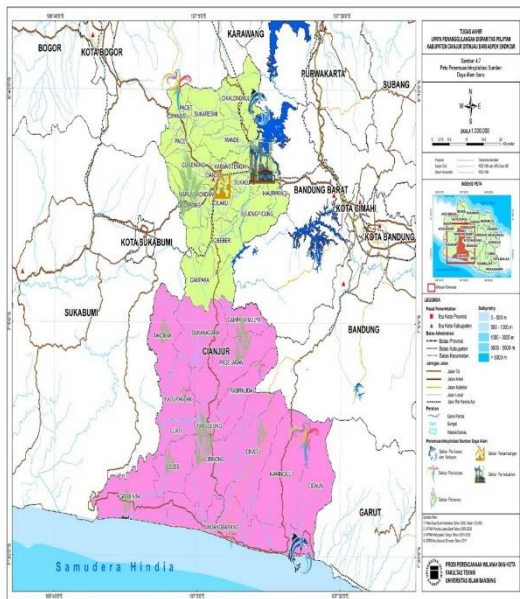
1. Penemuan/Eksplorasi Sumber Daya Alam Baru

a. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian sumber

penemuan/eksplorasi sumber daya alam baru berada di Kecamatan Campakamulya, Tangeung, Cijati, Takokak, Cikadu, Leles, Agrabinta dan Pagelaran. Adapun komoditi unggulan yang dapat dimaksimalkan seperti beras hitam, aren, tomat dan cabai, gula kelapa, dan beras).

- b. Sektor Pariwisata
 Pada sektor pariwisata sumber penemuan/eksplorasi sumber daya alam baru berada di Kecamatan Pasirkuda, Kadupandak, Naringgul, dan Sindnagbarang. Adapun objek pariwisata berupa wisata alam curug dan pantai.



Gambar 1. Peta Penemuan/Eksplorasi Sumber Daya Baru

- 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Berdasarkan hasil analisis, wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur didominasi dengan sumber daya manusia

berpendidikan SD (54%). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan persentase antara SD (54%) kepada tahap SMP (23%). Pengembangan sumber daya manusia yang dapat berpengaruh kepada upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi. Adapun upaya pengurangan ketimpangan wilayah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana Latihan Kerja;
 - b. Pembinaan mulai dari produk berkualitas hingga packaging dengan baik di sektor pertanian; dan
 - c. Pembinaan pelayanan kepariwisataan untuk mendukung sektor pariwisata.
3. Mobilisasi Tenaga Kerja dan Migrasi

Tenaga kerja yang berada pada wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 2 kelompok, antara kelompok yang bekerja di dalam wilayah dan luar wilayah. Untuk tenaga kerja yang berada di dalam wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur sebesar 94%, namun masih ada tenaga kerja yang bekerja sebagai TKI sebesar 6%.

Selain itu, pada wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur masih terjadinya migrasi out. Sehingga jika ini dibiarkan secara terus menerus, wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur akan kekurangan tenaga kerja untuk memanfaatkan potensi alam. Adapun upaya untuk

pengurangan ketimpangan wilayah dari segi tenaga kerja dan migrasi sebagai berikut:

- a. Membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada, khususnya wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur mempunyai potensi pada sektor pertanian dengan komoditas unggulan (beras hitam, padi, beras, aren, gula kelapa, cabai, dan tomat), pariwisata (wisata alam curug dan pantai), dan perikanan dan nelayan;
- b. Membuka peluang usaha untuk menstimulus pengembangan perekonomian wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang disebutkan pada poin 1, untuk sumber daya manusia yang berkerja di luar wilayah; dan
- c. Menarik TKI yang berada di luar negeri untuk kembali ke Kabupaten Cianjur dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal.

4. Pengurangan Biaya Transport dan Kendala Lokasi

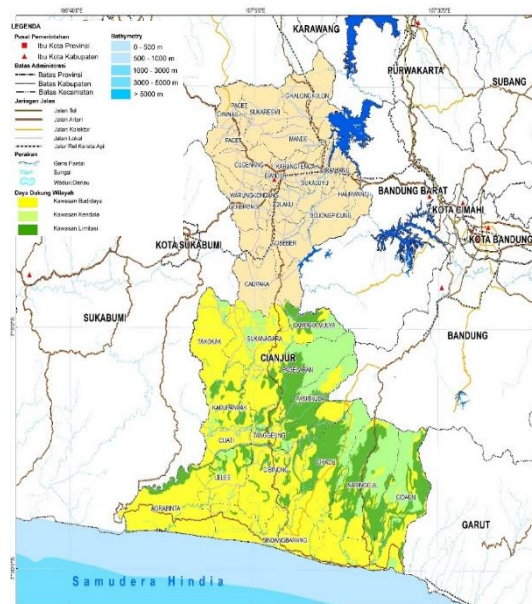
Pengurangan biaya transport dilakukan untuk membantu terjadinya aksesibilitas dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber daya alam, khususnya pada wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur. Dalam pengurangan biaya transport untuk upaya pengurangan disparitas wilayah sebagai berikut:

- a. Peningkatan jaringan pelayanan jalan pada Kecamatan Leles,

Kecamatan Cikadu dan Kecamatan Campakamulya;

- b. Dilakukannya pemeliharaan jaringan jalan dengan prioritas pemeliharaan jaringan jalan pada Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Cikadu, dan Kecamatan Campakamulya;

Selain pengurangan biaya transport, kendala lokasi berperan penting dalam pembangunan wilayah. Hal tersebut agar pembangunan wilayah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan mengurangi resiko dari bencana alam. Dalam wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur didominasi dengan wilayah yang berpotensi terbangun, namun pada bagian timur wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur didominasi dengan wilayah yang mempunyai kendala. Pada wilayah tersebut merupakan wilayah pergunungan dan memiliki rawan bencana alam gerakan tanah. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran kendala pembangunan wilayah dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Daya Dukung Wilayah Pembangunan Selatan Kabupaten Cianjur

1. Perbaikan Infrastruktur Publik

Dalam menunjang sektor-sektor perekonomian, diperlukan perbaikan infrastruktur publik seperti pasar, rumah sakit, balai latihan kerja yang menopang kegiatan perekonomian. Hal itu merupakan kebutuhan infrastruktur publik yang dapat membantu potensi sektor-sektor perekonomian antara lain sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor pertambangan, sektor perindustrian, dan sektor perikanan dan nelayan.

Adapun perbaikan infrastruktur publik guna upaya mengurangi disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi sebagai berikut:

- a. Pembangunan pasar di Kecamatan Pagelaran, guna menopang system pemasaran untuk produk kawasan selatan Kabupaten Cianjur;
- b. Pembangunan rumah sakit di Kecamatan Sindangbarang, guna melayani sumber daya manusia pada wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur; dan
- c. Pembangunan balai latihan kerja di Kecamatan Sukanagara, Pagelaran, Sindangbarang, Agrabinta, dan Cidaun. Adapun tema dari setiap balai latihan kerja adalah:
 - Balai Latihan Kerja Kecamatan Sukanagara (BLK Mesin Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata)

- Balai Latihan Kerja Kecamatan Pagelaran (BLK Entrepreneurship)
- Balai Latihan Kerja Kecamatan Sindangbarang (BLK Kepariwisata)
- Balai Latihan Kerja Kecamatan Agrabinta (BLK Pertanian Unggul)
- Balai Latihan Kerja Kecamatan Cidaun (BLK Perikanan Laut)

Dari perbaikan infrastruktur publik tersebut merupakan upaya pengurangan disparitas wilayah, karena perbaikan infrastruktur publik akan menopang kegiatan pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam pada sektor pertanian dan sektor pariwisata di wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian upaya penanggulangan disparitas wilayah Kabupaten Cianjur ditinjau dari aspek ekonomi, sebagai berikut:

1. Wilayah teridentifikasi disparitas ada sepuluh kecamatan antara lain Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Takokak, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Leles, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Sindangbarang, dan Kecamatan Agrabinta;
2. Wilayah pembangunan terbagi menjadi dua yaitu wilayah pembangunan utara Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Kecamatan Cipanas, Pacet, Sukaresmi, Cikalongkulon,

- Cugenang, Warungkondang, Gekbrong, Mande, Cianjur, Karangtengah, Cilaku, Sukaluyu, Ciranjang, Haurwangi, Bojongpicung, Cibeber dan Campaka. Dan wilayah pembangunan selatan Kabupaten Cianjur yang terdiri dari Kecamatan Campakamulya, Sukanagara, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Pasirkuda, Tanggeung, Cijati, Agrabinta, Leles, Cibirong, Sindangbarang, Cikadu, Naringgul, dan Cidaun.
3. Wilayah pembangunan utara didominasi dengan kecamatan yang sudah maju dan mandiri. Sedangkan, wilayah pembangunan selatan didominasi dengan kecamatan yang tertinggal dan berkembang.
 4. Upaya pengurangan ketimpangan wilayah menggunakan model Enhancing Market Forces: Factor Mobility and Product Market Integration dengan penjabaran sebagai berikut:
 - a. Penemuan/eksplorasi sumber daya alam baru;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Mobilisasi tenaga kerja dan migrasi;
 - d. Pengurangan biaya transport dan kendala lokasi; dan
 - e. Perbaikan infrastruktur publik.
- Pulau-Pulau Kecil, Archipelagio, dan Semeja). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agusta, I. (2014). Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia (Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Atmawikarta. Arum. (2009). Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Indeks Pembangunan Desa 2014 “Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa”. Jakarta Pusat : Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2018. Kabupaten Cianjur dalam angka 2012-2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. 2018. Kecamatan dalam angka di Kabupaten Cianjur 2015-2018.
- Daraba, Darda. (2001). Eksternalitas dan Kebijakan Publik. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Gustiyana, Rina. (2013). Analisis Permintaan Wisata dan Strategi Pengembangan Agriwisata Cilangkap Jakarta Timur. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Indeks Desa Membangun. Jakarta Selatan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Khairunnisa, Astari. Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). Pengantar Ekonomi

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2015). Pembangunan Wilayah (Kepulauan, Kelautan, Maritim, Terisolasi, Terpencil, Tertinggal, Perbatasan, Pesisir,

- Mikro. Jakarta: Salemba Empat.
- Martina, Ken. Modul Perkuliahan Perencanaan Wilayah. Jakarta : Universitas Esa Unggul.
- Mauliddiyah, Alfiana. (2014). Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu Tahun 2002-2012). Malang: Universitas Brawijaya.
- Menteri Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Jakarta Pusat : Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
- Mohammad, Nasir. (2010). Metode Penelitian. Jalarta: Erlangga.
- Muta'ali, Lutfi. (2015). Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Muta'ali, Lutfi. (2012). Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Safitri, Ira. (2014). Geografi Kependudukan. Bandung : UNISBA
- Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional. Padang: Badouse Media.
- Suharni, Sri. (2017). Pendidikan Menjadi Bahan Bakar Utama Pertumbuhan Ekonomi dalam https://www.kompasiana.com/sri_suharni753/58b007a5a823bdad061322ef/pendidikan-menjadi-bahan-bakar-utama-pertumbuhan-ekonomi diunduh pada tanggal 22 November 2018
- Sumodiningrat dan Wulandari. (2016). Membangun Indonesia dari Desa. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Tarigan, Robinson. (2015). Ekonomi Regional “Teori dan Aplikasi”. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. (2016). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Uma, Sekaran. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur 2018.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cianjur 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2005-2019.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2010-2030